



## 14 Daerah Irigasi Dapat Perbaiki

TABANAN, NusaBali

Sedikitnya 14 titik Daerah Irigasi (DI) tahun 2018 di Tabanan mendapatkan rehabilitasi atau perbaikan dengan anggaran DAK Rp 6,5 miliar. Hal ini didapatkan karena Tabanan merupakan subak paling luas, sehingga setiap tahunnya mendapatkan rehabilitasi.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tabanan I Gusti Ngurah Agung Oka Kamasan menjelaskan, bantuan rehabilitasi 14 titik itu bersumber dari DAK sebesar Rp 6,5 miliar. "Selain 14 titik dapat rehabilitasi DI, ada juga rehabilitasi 1 titik pemeliharaan jaringan, dan 8 titik peningkatan jaringan," ungkapnya, Jumat (26/1).

Ada pun DI yang mendapatkan rehabilitasi tersebut di antaranya, 1 DI di Kecamatan Selemadeg Timur, 1 DI di Kecamatan Baturiti, 1 DI di Ke-



• NUSABALI/DESAK

I Gusti Ngurah Agung Oka Kamasan

camatan Tabanan, 1 DI di Kecamatan Kerambitan, 2 DI di Kecamatan Pupuan, 4 DI di Kecamatan Penebel, 2 DI di Kecamatan Marga, dan 2 DI Kecamatan Selemadeg Timur. "Jadi yang terbanyak ada di

Kecamatan Penebel, 4 DI yang mendapat bantuan rehabilitasi," jelas Kamasan.

Lanjut Ngurah Kamasan, untuk DI yang mendapatkan pemeliharaan jaringan adalah DI Srinadi di Kecamatan Penebel dengan anggaran APBD Tabanan sebesar Rp 85 juta. Sedangkan 8 titik DI yang mendapatkan peningkatan jaringan bersumber dari anggaran Dana Intensif Daerah (DID) Rp 1,3 miliar.

Menurut Kamasan, rehabilitasi dilakukan setiap tahunnya untuk mengantisipasi berkurangnya debit air irigasi yang cenderung menurun sehingga dapat menjadi penyebab alih fungsi lahan. "Jumlah DI yang mendapatkan rehabilitasi menurun tahun 2018, kalau di tahun 2017 sebanyak 15 paket rehabilitasi jaringan dan paket peningkatan jaringan," terang Kamasan. **d**

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal : 7





## Siap Membantu Penataan Hilir Tukad Mati Dinas PUPR Anggarkan Rp 50 M untuk Pompa Banjir



Banjir yang terjadi di kawasan Kuta, beberapa waktu lalu. ● DOKNUSABALI

MANGUPURA, NusaBali

Pascabanjir besar yang melanda kawasan Kuta sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Badung langsung menyusun sejumlah program penanganan. Selain rencana menormalisasi Teluk Benoa di hilir Tukad Mati, pemerintah siap menggelontorkan anggaran besar untuk menyediakan pompa air.

"Sekarang Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida melakukan penataan sungai dalam penanganan banjir di hilir Tukad Mati yang

sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bila proyek sudah, yang belum dapat dibiayai kami siap membiayai seperti pompa banjir sebesar Rp 50 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IB Surya Suamba, Jumat (26/1) kemarin.

Dikatakan, anggaran pengadaan pompa bakal diusulkan pada tahun 2019 mendatang. Itu pun jika disetujui oleh pemerintah pusat, sebab wilayah Teluk Benoa menjadi kewenangan BWS Bali Penida. Surya Suamba pun berharap dengan tuntasnya pelaksanaan penataan Tukad Mati ini banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang.

Menurut Surya Suamba, banjir yang terjadi akibat dari kiriman air hujan dari hulu Tukad Mati yang sangat tinggi dan disaat yang sama di hilir air laut pasang. Tak ayal aliran Tukad Mati meluap di sepanjang DAS di Kawasan Jalan Dewi Sri, Nakula dan Kunti. "Dibandingkan banjir 10 tahun lalu, debit air saat ini lebih besar. Namun air lebih cepat surut. Contoh di Jalan Dewi Sri yang air bisa mengalir dalam waktu dua jam. Kalau dulu, sehari baru bisa surut airnya," ungkapnya.

Dampak dari banjir ini, mengakibatkan sejumlah rumah tergenang air. "Tapi kami sudah kirimkan lima pompa air untuk melakukan penyedotan. Dua memang milik dinas dan tiga milik pihak rekanan untuk membantu," katanya.

Seperti diketahui, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan kawasan kampung turis Kuta alami banjir. Banjir tak hanya menggenangi jalan, tapi juga rumah-rumah warga. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari musibah banjir yang terjadi. Bupati pun berjanji akan mengupayakan segala cara agar masalah banjir dapat teratasi dan tak terulang lagi dikemudian hari. **asa**

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal : 2



## Penerima Hibah Sulit Cari Buruh Bangunan

SEMARAPURA, NusaBali

64 penerima hibah urusan kebudayaan di Klungkung sampai saat ini belum menyeter Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal batas akhir SPJ itu, 10 Januari 2018. Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung, masalahnya pihak penerima

belum menyelesaikan proyek pembangunan.

Bahkan ada yang masih pesan palinggih, sulit mencari tukang dan lainnya. Kepala Disbudpora Klungkung I Nyoman Mudarta tidak menampik kondisi tersebut. Dari 282 penerima hibah penunjang urusan kebudayaan dari APBD Perubahan 2017 dengan anggaran Rp 21 miliar

yang belum menyeter SPJ, 64 penerima hibah. "Kami sudah cek langsung ke lapangan," ujarnya, Jumat (26/1).

Kata dia, sebagian besar penerima hibah yang belum menyeter SPJ tersebut beralasan sulit mencari buruh bangunan. Padahal pihaknya sudah mewanti-wanti sejak awal bagi penerima jika mengambil hibah itu jika sudah

yakin proyek pembangunannya tidak molor. Karena pencairan dana hibah pada Desember 2017. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada peran serta pihak yang memfasilitasi hibah tersebut, di mana sebagian besar dari kalangan dewan. "Kami berharap pihak yang memfasilitasi bisa membantu penerima hibah untuk menyelesaikan tanggungjaw-

abnnya," ujarnya.

Mudarta mencontohkan ada yang menerima hibah hingga Rp 200 juta untuk pembangunan bale banjar, namun sampai saat ini belum selesai pengerjaannya atau masih tahap 40 persen. "Kami akan koordinasikan dulu permasalahan ini dengan Sekda Klungkung," katanya. **wan**

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal : 6



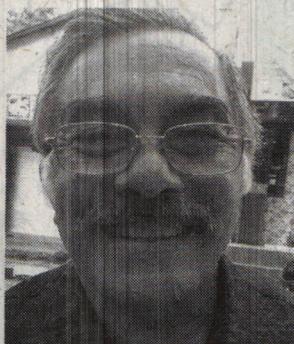
# Rp 1,3 M buat Pilkel Serentak

- Digelar Usai Coblosan Pilkada
- Biaya Kampanye Ditanggung APBD

## GIANYAR, TRIBUN BALI

- Kabupaten Gianyar akan menggelar Pemilihan Perbekel (Pilkel) secara serentak di 24 desa dinas pada September 2018. Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD) Gianyar telah menyiapkan anggaran Rp 1,3 miliar untuk tahap pemilihan. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gianyar, telah melayangkan surat pada setiap perbekel yang masa jabatannya berakhir Juli 2018.

Kepala Dinas PMD Gianyar, I Ketut Suweta, Jumat (26/1) mengatakan, 24 perbekel ini akan megakhiri masa jabatan dari Juli hingga Agustus. Bagi yang berakhir di Bulan Juli, secara aturan saat ini tidak boleh membuat program strategis, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun saat ini semua APBDes sudah diverifikasi, sehingga nantinya tidak me-



TRIBUN BALI/ WAYAN ERI GUNARTA

### I KETUT SUWETA

nimbulkan permasalahan.

"Semua APBDes sudah diverifikasi. Mereka (perbekel) sudah kami suruh untuk mengamprah ke Bagian Keuangan Gianyar. Terkait pemilihannya, belum ditetapkan, tetapi yang jelas usai Pilkada. Supaya para perbekel bisa dilantik langsung oleh bupati yang baru," ujar Suweta.

Dalam Pilkel serentak ini, kata Suweta, Pemkab Gianyar telah meny...

sebesar Rp 1,3 miliar. Nantinya, dana tersebut digunakan untuk pengadaan kotak suara, alat kelengkapan pemilihan, pencetakan baliho serta honor petugas pemilihan. Terkait apakah biaya kampanye para calon perbekel akan tanggung APBD, Suweta akan berkoordinasi dengan KPU Gianyar.

"Memang, KPU tidak ada kaitannya dengan Pilkel, tapi KPU sudah pengalaman, jadi hal-hal yang kami tidak ketahui akan koordinasikan ke sana, agar tak menyalah aturan," ucapnya. (weg)



Edisi : Minggu, 28 Januari 2018

Hal : 1





# APBD Buleleng Terancam Dirombak

## ★ DAU 'Dipangkas' 25 Persen untuk Kegiatan Fisik

Dana Alokasi Umum (DAU) harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga harus dilakukan kalkulasi ulang program APBD 2018.

SINGARAJA, NusaBali  
Posisi keuangan Kabupaten Buleleng yang telah disahkan dalam APBD Induk 2018, ter-

ancam dirombak. Masalahnya, ada ketentuan baru tentang pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana 25 persen mesti diarahkan pada kegiatan fisik.

Kabupaten Buleleng mendapat kucuran DAU pada tahun 2018, sekitar Rp 900 miliar lebih. Dalam APBD, hampir Rp 700 miliar telah dimanfaatkan untuk gaji PNS. Sisanya, juga telah dialokasikan untuk kegiatan yang sudah diarahkan dalam pemanfaatan DAU yang diatur sebelumnya, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Namun belakangan setelah APBD Induk 2018 rampung, muncul kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengisyaratkan agar

25 persen dari jumlah DAU yang diterima Kabupaten/kota dimanfaatkan untuk infrastruktur. Sehingga, jika mengikuti PMK tersebut, sekitar Rp 225 miliar dari jumlah DAU Rp 900 miliar lebih mesti diarahkan untuk kegiatan infrastruktur. "Rasanya sulit memenuhi 25 persen itu, karena semua dana itu sudah dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk yang ada sebelumnya. Ya untuk gaji pegawai saja, hampir Rp 700 miliar. Belum lagi kegiatan yang sudah diarahkan seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata Kepala Badan Bappeda dan Litbang, Kabupaten Buleleng, I Gede Dharmaja yang dikonfirmasi via telepon Minggu (28/1).

Menurut Dharmaja, jika mengikuti ketentuan 25 persen tersebut, berarti ada program kegiatan yang sudah disusun mesti ditinjau ulang. Karena tidak mungkin mengurangi alokasi gaji PNS. "Kondisi ini hampir dirasakan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, rasanya sulit memenuhi karena hampir sebagian besar DAU itu untuk pembayaran gaji PNS," ujarnya.

Sementara Sekda Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang dikonfirmasi terpisah mengaku sudah meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, terkait dengan pemanfaatan 25 persen DAU tersebut. Hasil

koordinasi tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan pergeseran pemanfaatan alokasi DAU. "Saya belum dapatkan hasil koordinasi tersebut, karena BKD dan Inspektorat ke Kementerian Keuangan hari Kamis lalu. Senin besok (Hari ini, red) kita akan bahas, kalau memang mesti tetap harus 25 persen untuk kegiatan infrastruktur tentu ada pergeseran (dalam APBD, red) nanti," jelasnya.

Menurutnya, jika ada pergeseran posisi keuangan, pihaknya tetap menyampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Buleleng, guna dibahas bersama. Pembahasan itu guna mendapat persetujuan dari Lembaga DPRD Buleleng atas pergeseran tersebut. k19





## DPRD Sebut Cuaca Perlambat Penyelesaian Proyek Bansos

SEMARAPURA, NusaBali

Anggota DPRD Klungkung Sang Nyoman Putrayasa, ket-erlambatan pengerjaan proyek hingga penyeteroran surat pertanggungjawaban (SPJ), bantuan hibah bansos urusan kebudayaan, oleh penerima bansos karena cuaca hujan. Di lain sisi, pihak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung menilai, sebagian besar penerima hibah bansos yang belum menggarap total proyeknya hingga belum menyeter SPJ, karena sulit mencari buruh bangunan.

"Eksekutif maupun legislatif harus bersama-sama mengawasi penyelesaian proyek berdana bansos hibah ini," ujarnya kepada NusaBali, Minggu (28/1).

Setelah turun meninjau proyek hibah yang masih tahap pengerjaan, jelas Putrayasa, sebagian besar mengalami kendala pada cuaca. Mengingat belakangan ini terus hujan deras, sehingga masyarakat tidak bisa bekerja. Ini juga harus menjadi permakluman sepanjang proyek itu dalam tahap pengerjaan sesuai anggaran yang diterima. "Kalau anggaran sudah diterima tetapi tidak dikerjakan tidak akan kami toleransi," tegas Putrayasa.

Untuk hibah yang difasilitasinya sendiri, pihak penerima sudah melakukan kewajibannya baik pengerjaan proyek maupun menyeter surat pertanggungjawaban (SPJ).

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus turun ke lapangan untuk mengecek pengerjaan hibah tersebut. Sejak awal Mudarta mewanti-wanti kepada penerima bansos

hibah yang nilainya cukup besar, apabila merasa tidak mampu mengerjakan dengan waktu yang diberikan agar tidak mengambil dulu. "Ada 14 pemohon hibah dari 282 pemohon di atas Rp 150 juta-Rp 400 juta tidak berani mengambil karena merasa tidak mampu mengerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan," ujar Mudarta.

Bahkan, jelas Mudarta, satu pemohon hibah yang dananya sudah masuk di rekeningnya mengembalikan lagi, dengan pertimbangan tidak mampu melaksanakan. Kata dia, dari 282 penerima hibah penunjang urusan kebudayaan dari APBD Perubahan 2017 dengan anggaran Rp 21 miliar yang belum menyeter SPJ 64 penerima hibah. "Kita sudah cek langsung ke lapangan ada juga yang tidak mengerjakan sama sekali, nanti kita akan turun dengan tim," ujarnya, Jumat (26/1).

Sebagian besar penerima hibah yang belum menyeter SPJ tersebut beralasan sulit mencari buruh bangunan. Padahal pihaknya sudah mewanti-wanti sejak awal bagi penerima jika mengambil hibah itu jika sudah yakin proyek pembangunannya tidak molor. Karena pencairan dana hibah akhir 2017.

Ketua Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Klungkung Cakra Yuda mengatakan, pihaknya bersama Inspektorat dan pihak terkait akan turun ke lapangan mengecek proyek bantuan hibah tersebut. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran tentu akan ada proses lebih lanjut. "Sebelumnya kami sudah berikan sosialisasi terkait hibah ini kepada pihak penerima," katanya. **wan**

Edisi : SENIN, 29 Januari 2018

Hal : 6